

THR
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 5 BD 2024/NO. 5, 5 HLM
PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.14 Tahun 2024; Perda Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2023;
 - Dalam Perbup ini bahwa Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada: a. PNS dan CPNS; b. Bupati dan Wakil Bupati; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. PPPK. Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada: a. PNS dan CPNS; b. Bupati dan Wakil Bupati; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. PPPK. Dan Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: a. sedang cuti di luartanggung negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dan: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 28 Maret 2024.